

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah atau yang dapat disebut juga kewenangan fiskal. Menurut Haryadi (2014) kewenangan fiskal atau *fiscal policy* adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kewenangan fiskal dalam hal ini merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Menurut Zain (2008) instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak dimana pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah yang diatur oleh undang-undang untuk pembiayaan umum dari pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah dan tidak mengandung unsur imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak. Pemerintah yang menjalankan kewenangan fiskal dengan maksud untuk berusaha mempengaruhi jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan yang terakhir dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan fiskal, setiap daerah harus mampu mewujudkan potensi yang dimilikinya dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya keuangan yang lebih baik, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Menurut Astuti (2019) pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah digunakan untuk kebutuhan pengeluaran daerah. Pemerintah daerah harus dapat

mengembangkan serta meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara mengelola sumber daya yang dimiliki sebaik mungkin.

Pendapatan asli daerah berperan penting dalam pembangunan daerah dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, terutama pajak daerah retribusi daerah. Adanya ketidakstabilan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah disebabkan karena pandemi sehingga mengalami penurunan pemungutan pajak, dimana pendapatan asli daerah umumnya berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pandemi ini menyebabkan pemerintah harus melakukan perencanaan ulang terhadap APBD yang sudah dirancang sebelumnya, karena anggaran tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah daerah dapat menaikkan penerimaan daerahnya dengan cara mengelola sumber daya di daerah tersebut, kemudian pendapatan asli daerah dapat dimasukkan sebagai sumber pendanaan belanja modal pada masa yang akan datang. Secara umum semakin tinggi pendapatan asli daerah maka kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan semakin bagus. Menurut Muhammad Luthfi Haryamto (2014) penerimaan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal apabila penerimaan pendapatan asli daerah tinggi maka akan memberikan pengaruh pada alokasi belanja modal, begitu sebaliknya jika penerimaan pendapatan asli daerah rendah maka dapat mempengaruhi kurangnya alokasi belanja modal.

Adanya transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa lebih fokus untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai penunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Kemampuan keuangan daerah juga harus memadai untuk dapat meningkatkan investasi. Indikator tinggi rendahnya investasi daerah yaitu besarnya rasio belanja modal di dalam APBD. Menurut Arsa (2015) pengalokasian belanja modal di pemerintah daerah diberikan pengaruh dari bagus atau tidak kinerja keuangan daerah, contohnya tingkat desentralisasi fiskal, tergantungnya keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas pendapatan asli daerah, serta tingkat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kinerja

keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengelola sumber keuangan asli daerah untuk mendukung pemerintah pelayanan masyarakat, dan dalam pembangunan daerah. Dengan begitu terdapat keterkaitan antara berkembangnya perekonomian daerah terhadap kinerja keuangan.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah harapannya bisa meningkatkan anggaran belanja modal yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik juga menjadi tolak ukur cerminan tingkat kemandirian suatu daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan. Dimana pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur membutuhkan peran aktif kemampuan pemerintah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Adanya ketidakstabilan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah disebabkan karena pandemi sehingga mengalami penurunan pemungutan pajak, retribusi daerah yang berkurang, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kurang mengoptimalkan dalam penyertaan modal daerah, kemudian dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kurang digunakan untuk kebutuhan pengeluaran daerah utamanya belanja modal dari tahun ke tahun yang dapat mempengaruhi dalam pengukiran kinerja keuangan pemerintahan. Ketidakstabilan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal di Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (miliar)	Dana Alokasi Umum (miliar)	Belanja Modal (miliar)
1	2018	Rp18.531,06	Rp3.813,41	Rp2.840,55
2	2019	Rp19.327,13	Rp3.998,43	Rp2.770,97
3	2020	Rp17.951,00	Rp3.662,91	Rp1.904,56
4	2021	Rp18.935,89	Rp3.650,37	Rp1.969,92
5	2022	Rp21.256,55	Rp3.652,12	Rp2.528,74

Sumber: Data APBD Murni, realisasi APBD adalah data realisasi tahunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama pemerintah daerah. Anggaran daerah menempati posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas, efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan pendapatan, belanja, dan keuangan, alat pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otorisasi belanja di masa depan, standar ukuran penilaian kinerja, dan alat koordinasi seluruh kegiatan di daerah dalam banyak bidang yang berbeda pada unit kerja. Anggaran, sebagai instrumen kebijakan dan menjadi pusat perhatian, harus mencakup kinerja, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Kinerja terkait anggaran adalah kinerja keuangan yang berupa perbandingan antara komponen-komponen yang dimasukkan dalam anggaran. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan APBD yang telah diidentifikasi dan dilaksanakan saat ini, khususnya rasio-rasio keuangan pada tingkat hierarki keuangan. Penelitian ini menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal untuk mengukur kinerja fiskal daerah sebagai variabel dependen karena rasio keuangan derajat desentralisasi fiskal berkaitan dengan alokasi penggunaan sumber daya ekonomi, khususnya penggunaan sumber daya ekonomi yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal sesuai tujuan peraturan yang telah ditentukan. Efisiensi operasional pemerintahan daerah dalam hal keuangan daerah diperlukan untuk dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan atau kegiatan daerah berdasarkan pemanfaatan sumber daya asli atau kekayaan daerah masing-masing. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah Jawa Timur seharusnya meningkatkan kualitas kerjanya. Dengan ini perlunya dilakukan sebuah penelitian terhadap pendapatan, alokasi dana, belanja, dan kinerja keuangan untuk mengetahui hubungan dari keempatnya.

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian terdahulu, oleh penelitian Angelina, Efni, and Rasuli (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ketut & Anggreni, 2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah, Dana perimbangan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dan Belanja modal berpengaruh negatif serta signifikan pada kinerja keuangan daerah. Berdasarkan adanya kewenangan fiskal yang bersifat desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan realisasi anggaran pendapatan daerah yang mengalami ketidakstabilan dengan diikuti dana alokasi umum juga belanja modal yang cenderung menurun dimana hal tersebut merupakan poin utama untuk meningkatkan kualitas kinerja, serta perbedaan hasil dari penelitian terdahulu maka dilakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk memperkaya ilmu dalam bidang akuntansi terutama dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal (APBD), Dana Transfer ke Daerah juga Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dengan melihat besar pengaruh yang dimiliki Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

b. Manfaat Praktis

1) Peneliti

Penelitian yaitu metode menemukan sebuah pemikiran yang kritis untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap ilmu yang didasari dengan analisis serta secara sistematis dalam proses belajar. Penelitian ini digunakan dalam memenuhi penyusunan skripsi untuk mencapai gelar sarjana di program studi akuntansi sektor publik.

2) Pemerintahan

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dalam mengoptimalkan kebijakan publik juga bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah.

3) Akademisi

Bermanfaat bagi akademisi sebagai bahan referensi dan data tambahan untuk peneliti serupa atau sejenis yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.

4) Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan menambah pengetahuan terkait pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintahan provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan informasi dalam mengembangkan untuk memperluas objek penelitian selanjutnya di masa mendatang.